

PENGARUH PDRB SEKTOR MIGAS DAN TENAGA KERJA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN BOJONEGORO PADA TAHUN 2000-2021

Annisa Nur Fitriana

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: annisa.19002@mhs.unesa.ac.id

Hendry Cahyono

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: hendrycahyono@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berupaya mengkaji dampak PDRB sektor migas terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2000 hingga 2021. Variabel yang diteliti dalam riset ini meliputi kemiskinan sebagai variabel dependen, dan PDRB di sektor migas dan tenaga kerja sebagai variabel independen. Riset ini memanfaatkan desain riset kuantitatif dan memanfaatkan teknik analisis regresi linier berganda, khususnya menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) untuk analisis data. Temuan mengungkapkan bahwa ada korelasi signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri minyak dan gas, serta tenaga kerja, dan kejadian kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci: *PDRB sektor migas, Tenaga Kerja, Kemiskinan*

Abstrack

The objective of this study is to investigate the impact of the oil and gas industry's gross regional domestic product and labor on poverty levels in the Bojonegoro district from 2000 to 2021. The variables under investigation in this study include poverty as the dependent variable, and gross regional domestic product and labor as independent variables. The present study employs a quantitative research design and utilizes the multiple linear regression analysis technique with OLS (Ordinary Least Square) as the chosen method of analysis. The findings indicate that the gross regional domestic product of the oil and gas industry, as well as labor, exert a noteworthy impact on poverty levels in the Bojonegoro district during the period spanning from 2000 to 2021.

Keyword : *Gross regional domestic product of the oil and gas, Labor, Poverty*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu kabupaten terkaya di provinsi Jawa Timur. Kekayaan alam yang melimpah terutama dalam sektor penggalian membuat kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai kabupaten penghasil minyak dan gas terbesar. Ditengah gencarnya produksi migas di kabupaten Bojonegoro, masih terjadi masalah perekonomian yang kompleks yakni kemiskinan. Kemiskinan ialah tantangan pembangunan yang dihadapi oleh semua bangsa, termasuk Indonesia. Distribusi kekayaan yang merata dalam suatu komunitas melalui proses pembangunan menjadi tujuan akhir pengentasan kemiskinan (Murohman et al., 2014). Berdasarkan data yang dicatat oleh BPS Bojonegoro, hingga tahun 2021 tingkat kemiskinan di Bojonegoro sebesar 13,27% atau sebanyak 166,52 ribu jiwa. Adanya kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain kendala geografis, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kepadatan penduduk, akses pendidikan yang terbatas, dan kondisi kesehatan yang kurang optimal (Armylia & Wasino, 2021).

Pengukuran kemiskinan menjadi metrik yang krusial dalam menilai kemajuan pembangunan daerah. Setiap wilayah geografis akan berusaha mencapai pembangunan ekonomi yang maksimal dan mengentaskan kemiskinan (Sunusi et al., 2014). Eskalasi kemiskinan bisa berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, karena kedua masalah tersebut saling terkait. Kurangnya kesempatan kerja bagi sebagian besar penduduk dapat menyebabkan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dipekerjakan, sehingga mengurangi pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi (Afdal & Mike, 2018).

Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah sarana untuk menilai kinerja perekonomian secara keseluruhan (Giovanni, 2018). PDRB mengacu pada nilai moneter agregat barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah geografis tertentu selama periode tertentu, biasanya mencakup satu tahun kalender (Permana & Arianti, 2012). Pada dasarnya ketika PDRB suatu wilayah meningkat, maka kesejahteraan di wilayah tersebut akan dapat dicapai. Karena manfaat dari peningkatan PDRB adalah mencapai kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Romhadhoni et al., 2018). Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, PDRB Bojonegoro mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagai dampak penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) migas ke Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam Blok Cepu. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), daerah yang diakui sebagai daerah atau lapangan penghasil minyak dan gas bumi berhak mendapatkan DBH sebesar 3%. Tingkat pertumbuhan PDRB berfungsi sebagai metrik untuk menilai keberhasilan upaya pembangunan dan merupakan prasyarat untuk pengentasan kemiskinan (Permana & Arianti, 2012)..

Peningkatan hasil PDRB tidak lepas dari peran masing-masing sektor. Bertambahnya jumlah produksi dari berbagai sektor yang menyebabkan jumlah PDRB meningkat setiap tahunnya. Kegiatan produksi dilakukan oleh sekumpulan orang atau yang biasa disebut tenaga kerja. Sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja” ialah orang-orang yang melakukan kegiatan produktif yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Tingkat kemiskinan bisa dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan penduduk bisa menyebabkan peningkatan angkatan kerja, yang pada gilirannya bisa memengaruhi tingkat output daerah (Wahyudi & Yuliarmi, 2018).

Adanya faktor-faktor produksi, termasuk akumulasi tenaga kerja dan modal, serta kemajuan teknologi, merupakan faktor penentu tercapainya tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Kenaikkan jumlah tenaga kerja tentunya mengakibatkan bertambahnya jumlah produksi barang pada berbagai sektor dan juga menyokong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (Prasetyawan et al., 2017). Sehingga berdasarkan kondisi diatas peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai mengenai pengaruh PDRB sektor migas dan tenaga kerja pada tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan desain riset kuantitatif, yang melibatkan penyelidikan populasi atau sampel numerik, diikuti dengan analisis statistik. Riset ini memanfaatkan data sekunder time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro dan Jawa Timur. Sampel penelitian diperoleh melalui penggunaan teknik *purposive sampling*.

Riset ini memanfaatkan kemiskinan sebagai variabel dependen, sedangkan PDRB sektor migas dan tenaga kerja sebagai variabel independen. Selain itu, data yang diperoleh menjalani analisis melalui penggunaan pendekatan analisis regresi linier berganda. Teknik analisis ini dimanfaatkan untuk mengetahui pengaruh PDRB industri migas dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dalam fungsinya, variabel independen yang memengaruhi variabel dependen dinyatakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dengan penjelasan:

Y = Tingkat kemiskinan

α = Bilangan konstanta

β_1 - β_2 = Koefisien regresi berganda

X_1 = PDRB Sektor Migas

X_2 = tenaga kerja

e = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Berlandaskan temuan dari pengujian yang dilakukan, bisa diketahui bahwa nilai Jarque-Bera ialah 1,314100, sedangkan *p value* adalah 0,518378. Patut dicatat bahwa nilai *p* yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Akibatnya, data dalam penyelidikan ini menunjukkan distribusi normal.

Uji heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan diketahui nilai *Chi Square* (2) $0,5539 > 0,05$, maka H_0 diterima. Bisa diambil konklusi bahwa heteroskedastisitas tidak ada dalam model.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, nilai Prob.Chi Square (2) adalah $0,0671 > 0,05$ maka H_0 diterima dengan artian tidak terdapat masalah autokorelasi pada data tersebut.

Uji Multikolinieritas

berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, nilai VIF masing-masing variabel yakni sebesar 2,786507 dan $2,78507 < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Uji Regresi linier berganda

Berlandaskan temuan uji yang sudah dilakukan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$4684,763 - 141,7314 + 0,063191 + e$$

Persamaan ini mengungkapkan dampak variabel bebas pada variabel terikat dalam kondisi berikut:

1. Konstanta α sebesar 4684,763 yang berarti jika PDRB sektor migas dan Tenaga kerja dianggap tetap maka besarnya tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro pada tahun 2000-2021 ialah 46,84 ribu jiwa.
2. Nilai koefisien β_1 sebesar -141,7314 yang berarti jika PDRB Sektor migas naik sebesar satu Milyar Rupiah maka tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro akan menurun sebesar 141,73 ribu jiwa.
3. Nilai koefisien β_2 0,063191 sebesar yang berarti jika persentase tenaga kerja naik sebesar satu persen maka tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro akan meningkat sebesar 6,31 ribu jiwa

Pengaruh PDRB Sektor migas terhadap kemiskinan di kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan hasil uji yang dilakuan diketahui bahwa PDRB berefek secara signifikan pada kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Hasil ini memperkuat temuan riset milik Dama et al. (2016) yang menyebutkan bahwa PDRB berefek pada kemiskinan di kota

Manado dan juga selaras dengan riset dari Jannah & Sofyan (2016) yang menyebutkan bahwa PDRB sektor migas berefek signifikan pada kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dikatakan sukses jika PDRBnya terus mengalami kenaikan disetiap periodenya. Peningkatan PDRB bisa mengarah pada pencapaian upaya peningkatan kesejahteraan individu, yang dapat mencakup inisiatif yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan. Peningkatan PDRB Bojonegoro terus mengalami peningkatan berkat adanya eksploitasi migas. Sehingga berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Bojonegoro, migas menjadi sektor penyokong terbesar terhadap meningkatnya PDRB Bojonegoro disetiap tahunnya.

Adhitama et al. (2014) menjelaskan bahwa dengan adanya sektor minyak dan gas di Bojonegoro mampu mempengaruhi proses berkembangnya dan pembangunan daerah. Dampak sektor migas terhadap pembangunan daerah terlihat melalui perannya dalam menambah pendapatan daerah, mendorong proses pembangunan daerah, dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Pemerintah daerah tidak hanya melakukan proses pembangunan itu secara sendiri yang berupa kebijakan ataupun program-programnya, tetapi juga ada keterlibatan seara langsung dari perusahaan sektor dalam proses pembangunan melalui program CSR.

Kemiskinan dan sektor migas menjadi masalah dan keuntungan bagi kabupaten Bojonegoro. Kemiskinan di Bojonegoro sudah terjadi beberapa dekade yang lalu, sedangkan migas merupakan hal yang baru karena mampu diekplorasi dengan baik sejak beberapa tahun yang lalu. Meskipun demikian, berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS bahwasanya pada setiap tahunnya tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro terus mengalami penurunan. Pemerintah kabupaten Bojonegoro mengklaim bahwa penurunan tingkat kemiskinan ini dimungkinkan karena adanya kontribusi migas baik secara langsung maupun melalui beberapa penggunaan anggaran pendapatan yang tepat (Ariyanti & Santoso, 2013).

Kontribusi migas ditunjukkan dengan adanya pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang diterima oleh kabupaten Bojonegoro yang termasuk salah satu daerah yang termasuk dalam blok Cepu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 2021 mengenai HKPD yang menyatakan bahwa daerah yang masuk dalam blok atau lapangan penghasil migas maka akan berhak mendapatkan DBH sebesar tiga persen. Sehingga anggaran dana bagi hasil inilah yang dapat digunakan sebagai penyokong dalam upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten Bojonegoro.

Adanya DBH yang diterima kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pemerintah Bojonegoro mengklaim bahwasannya dengan adanya DBH yang terus mengalir, sedikit banyak dapat digunakan sebagai penyokong upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program pendidikan yakni berupa beasiswa terhadap siswa-siswi Bojonegoro (Armylia & Wasino, 2021). Dana bagi hasil yang diperoleh disalurkan dalam bentuk dana sekolah bagi siswa-siswi di seluruh kabupaten Bojonegoro.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan sektor migas di Bojonegoro memberikan kontribusi besar terhadap daerah Bojonegoro. Hal itu terlihat dari adanya peningkatan pendapatan daerah dan menjadi pendorong terhadap pembangunan daerah termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan di kabupaten Bojonegoro

Temuan dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Temuan ini berbeda dengan riset Daftian Tri Prasetyawan (2017), yang menunjukkan bahwa angkatan kerja berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur. Pada prinsipnya, salah satu faktor pendukung perekonomian adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang berkualitas sangat dibutuhkan guna mencapai pekonomian yang maju (Purnomo & Kusreni, 2019). Berdasarkan teori, penurunan tingkat kemiskinan dapat disebabkan oleh adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun, hasil pengujian diatas menunjukkan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap kemiskinan, dengan artian ketika tenaga kerja meningkat maka kemiskinan di kabupaten Bojonegoro akan ikut meningkat.

Temuan ini tidak sesuai dengan proposisi teoritis bahwa pekerjaan memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan. Okun (1962) mengemukakan, sebagaimana dikutip dalam Arsyad (2010), bahwa berinvestasi pada tenaga kerja merupakan strategi yang layak untuk mengurangi tingkat kemiskinan, sekaligus mengatasi masalah pengangguran. Purnomo & Kusreni (2019) juga menyatakan bahwa salah satu upaya pengentasan kemiskinan adalah peningkatan lapangan kerja. Setidaknya ada dua kemungkinan yang mampu memberikan penjelasan terkait penyebab peningkatan tenaga kerja yang justru meningkatkan kemiskinan. Pertama, tenaga kerja yang terserap bukan termasuk kategori penduduk miskin. Ketika keahlian yang tinggi menjadi salah satu syarat dalam suatu lapangan pekerjaan yang tersedia, maka kesempatan bagi penduduk miskin untuk mendapatkan pekerjaan tersebut sangatlah kecil sehingga manfaat dari ketersediaan lapangan kerja ini tidak dirasakan oleh mereka. Penyebab utamanya adalah keterbatasan keterampilan yang mereka miliki. Kemungkinan kedua ialah peningkatan jumlah tenaga kerja, namun upah yang mereka terima tidak mampu mengangkat status ekonomi mereka ke ambang garis kemiskinan. Fenomena peningkatan penyerapan tenaga kerja terpantau lebih banyak terjadi di daerah tertinggal secara ekonomi dimana industri pertanian memegang posisi dominan. Dalam artian penduduk di daerah tersebut lebih banyak yang bekerja sebagai petani dengan mengandalkan tanah atau lahan yang telah dimiliki. Menurut data BPS, industri pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Bojonegoro. Sektor tersebut memiliki kecenderungan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi. Menurut BPS Bojonogoro, terdapat disparitas tingkat upah antara sektor pertanian dan sektor penggalian, pertambangan, dan industri, yang sebelumnya lebih rendah. Hal ini yang kemungkinan menjadi penyebab walaupun jumlah tenaga kerja di

Bojonegoro terus mengalami peningkatan, namun tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi.

Kemungkinan tersebut bukan berarti bahwa penyerapan tenaga kerja mengakibatkan kemiskinan, namun belum mampu menjadi faktor pendorong penurunan kemiskinan yang terjadi di kabupaten Bojonegoro. Penyebabnya adalah tingginya penyerapan tenaga kerja yang terjadi disektor pertanian. Tingkat pendapatan yang tidak mencukupi dari sektor pertanian tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap kemiskinan bagi mereka yang memilih untuk bekerja dalam industri ini. Sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor migas atau pertambangan dan sektor industri relative lebih rendah, meskipun dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

Pengaruh PDRB Sektor migas dan tenaga kerja terhadap kemiskinan

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh tingkat PDRB sektor migas dan tenaga kerja yang dibuktikan dengan hasil pengujian yang dilakukan. Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwasanya keduanya memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro.

Kemiskinan pada dasarnya ialah persoalan klasik yang sudah ada sedari dahulu. Selama ini belum ditemukan suatu desain ataupun solusi yang efektif guna meenanggulangi masalah kemiskinan (Habibullah, 2010). Dari segi ekonomi, penyebab pertama kemiskinan ialah pola kepemilikan sumber daya yang timpang, yang pada akhirnya menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Produktivitas dan upah yang rendah terkait dengan disparitas kualitas SDM. Ketiga, adanya perbedaan akses dan modal yang menjadi penyebab munculnya kemiskinan di suatu wilayah (Roostartina, 2013). Permasalahan kemiskinan ini juga menjadi masalah kompleks yang dihadapi kabupaten Bojonegoro. Armylia & Wasino (2021) mengatakan bahwa kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro diakibatkan oleh kondisi geografis, sarana dan prasarana, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas kesehatan.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 kemarin kemiskinan di Bojonegoro kembali meningkat, sedangkan PDRB juga mengalami peningkatan. PDRB menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam melakukan suatu pembangunan. Sedangkan sektor migas atau pertambangan kini menjasi hal yang paling disoroti di Kabupaten Bojonegoro (Ariyanti & Santoso, 2013). Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Bojonegoro, migas menjadi penyokong utama dalam meningkatnya PDRB Bojonegoro, Peningkatan PDRB sektor migas setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan dapat mempercepat pembangunan ekonomi salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, peningkatan tenaga kerja juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Semakin banyak tenaga kerja, maka semakin banyak pula individu yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan memiliki kehidupan yang layak juga menjauh dari batas garis kemiskinan (Nizar et al., 2013).

Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melakukan perbaikan infrastruktur di beberapa daerah yang dapat menciptakan adanya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat di kabupaten Bojonegoro. Selain itu, pengoptimalan hasil PDRB juga dapat menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi di kabupaten Bojonegoro. Ini dilaksanakan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang nantinya akan dapat berimplikasi pada penurunan kemiskinan (Armylia & Wasino, 2021).

KESIMPULAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PDRB sektor migas dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro antara tahun 2000 hingga 2021. PDRB Sektor migas dan tenaga kerja juga mampu mempengaruhi kemiskinan secara bersama-sama.

Peningkatan PDRB sektor migas diharapkan mampu menjadi faktor pendorong bagi pemerintah untuk dapat memaksimalkan proses pembangunan ekonomi salah satunya dengan menanggulangi masalah kemiskinan. Bukan hanya sekedar permasalahannya saja tetapi juga beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan hasil PDRB maupun DBH dari sektor migas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan pemerintah juga mampu meningkatkan kualitas SDM terutama melalui pendidikan. Selain itu, memperluas lapangan pekerjaan juga dapat menjadi solusi kemiskinan melalui tenaga kerja utamanya dalam sektor migas.

REFERENSI

- Adhitama, O., Santoso, B., & Riyanto. (2014). Kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 492–498.
- Afdal, A., & Mike, T. (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kab/kota Sumatera Barat. *EcoGen*, 1(September), 616–625.
- Ariyanti, D. ., & Santoso, E. . (2013). Pengaruh sektor migas terhadap pengembangan wilayah Bojonegoro. *TEKNIK POMITS*, 2(2), 2011–2014.
- Armylia, M., & Wasino. (2021). Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 1982-2008. *Journal of Indonesian History*, 10(1), 55–66. <https://doi.org/10.15294/jih.v10i1.46944>
- Dama, H. Y., Lopian, A. L. C., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di kota manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03), 549–561.
- Giovanni, R. (2018). Analisis pengaruh pdrb, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau jawa tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31.

- Habibullah, A. (2010). Alternatif Model Kebijakan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Pamator*, 3(1), 39–50.
- Jannah, M., & Sofyan, S. (2016). Pengaruh sektor migas dan non migas terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 1(2), 339–347.
- Murohman, Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2014). Peranan sektor ekonomi dalam pengentasan kemiskinan di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 23–41.
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1–8.
- Permana, A. Y., & Arianti, F. (2012). Analisis pengaruh pdrb, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 1(1), 1–8.
- Prasetyawan, D. T., Hanim, A., & Lilis, Y. (2017). Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Journal Ekuilibrium*, II(1), 45–50.
- Purnomo, A. B., & Kusreni, S. (2019). Pengaruh investasi, pdrb, dan penyerapan tenaga kerja terhadap jumlah penduduk miskin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 29(2), 79–93. <https://doi.org/10.20473/jeba.V29I22019.6213>
- Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2018). Pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb) daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka di provinsi DKI Jakarta. 14(2), 115–121. <https://doi.org/10.24198/jmi.v14.n2.2018.115-121>
- Roostartina, E. (2013). Ekonomi pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 20–33.
- Sunusi, D. K., Kumenaung, A., & Rotinsulu, D. (2014). Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 120–137.
- Wahyudi, I. P. A. R., & Yuliarmi, N. N. (2018). Pengaruh jumlah tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. *E-Jurnal EP Unud*, 10(3), 1187–1218.